

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN BERBASIS KOMUNITAS PADA KAMPUNG KOTA DI INDONESIA

Paulus Bawole¹⁾, dan Haryati²⁾

¹⁾ Univ. Krist. Duta Wacana

paulus @staff.ukdw.ac.id

²⁾ Universitas Kristen Duta Wacana

haryati @staff.ukdw.ac.id

ABSTRACT

Urban areas attract people to get the economic opportunities offered. Because people migrate from the area of origin to urban areas, the area grows both in size and population. The upper - middle class people have no problems about their lives in urban areas, but the poor who live in urban kampongs are marginalized by formal urban communities. As humans, poor people also have the right to live better as other rich people. But the most important thing is that each city resident is a stakeholder, and therefore has something unique and important to add to the development process in the city. The KOTAKU program initiated by the central government for the regions is a community-based development program that creates a platform for collaboration. By intensifying the collaboration of stakeholders including the local government and the poor in creating Kampong Development Plans, an increase in urban Kampong settlements can be done easily.

Keywords: *Development, Collaboration, Community Based, Empowerment*

ABSTRAK

Kawasan perkotaan menarik orang untuk mendapatkan peluang ekonomi yang ditawarkan. Karena orang bermigrasi dari daerah asal ke daerah perkotaan, maka daerah perkotaan tersebut tumbuh baik dalam ukuran maupun jumlah populasinya. Masyarakat kelas menengah ke atas tidak memiliki masalah tentang kehidupan mereka di daerah perkotaan, tetapi masyarakat miskin yang tinggal di kampung kota terpinggirkan oleh masyarakat perkotaan formal. Sebagai manusia, orang miskin juga memiliki hak untuk hidup lebih baik seperti orang kaya lainnya. Namun yang paling penting adalah bahwa setiap penduduk kota adalah pemangku kepentingan, dan karena itu memiliki sesuatu yang unik dan penting untuk ditambahkan ke dalam proses pembangunan di kota. Program Kotaku yang diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk daerah merupakan program pengembangan berbasis komunitas yang menciptakan platform untuk berkolaborasi. Dengan mengintensifkan kolaborasi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dan penduduk miskin dalam menciptakan Rencana Pengembangan Kampung, peningkatan permukiman kampung perkotaan dapat dilakukan dengan mudah.

Kata Kunci: *Pembangunan, Kolaborasi, Berbasis Komunitas, Pemberdayaan*

PENDAHULUAN

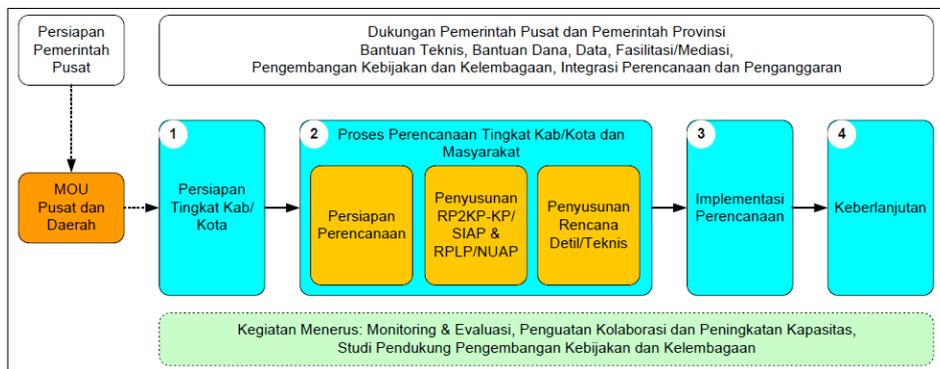
Fenomena urbanisasi merupakan tantangan yang dihadapi dunia saat ini, karena berpengaruh pada perkembangan kota yang menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh dengan penduduk miskinnya. Masyarakat marjinal yang berpenghasilan menengah ke bawah mengembangkan rumah mereka pada kantong-kantong kumuh di wilayah kota. Fenomena ini pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Kekumuhan yang terjadi pada kantong-kantong kumuh di tengah kota pada umumnya disebabkan oleh minimnya fasilitas infrastruktur dikawasan kampung

kota. Infrastruktur yang kondisinya sangat memprihatinkan dan minim sekali antara lain infrastruktur teknis seperti drainage, air bersih, pengolahan limbah domestic, fasilitas listrik, dll. Selain itu infrastruktur transportasi berupa jalan, lorong dan ruang-ruang terbuka juga terlihat minim dan buruk sekali kualitasnya. Hal ini disebabkan karena fasilitas-fasilitas terbentuk secara spontan akibat pertumbuhan rumah yang juga berkembang secara spontan.

Dengan adanya fenomena yang dijelaskan diatas, pihak pemerintah berusaha mengatasi permasalahan kumuh dengan program-program pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilakukan seperti program KIP (Kampung Improvement Program), P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) dan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang sedang dijalankan saat ini. Kawasan permukiman kumuh yang diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman. Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016 - 2020 adalah dengan meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Tahapan Penyelenggaraan program terdiri dari *Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Keberlanjutan*. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat dan beberapa pihak lainnya,



Gambar 1. Diagram Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kota dan Masyarakat
 Sumber: Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Tentang : Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh

PERMUKIMAN KUMUH KAMPUNG KOTA

Kepadatan Bangunan

Kepadatan area perumahan di permukiman informal sangat tinggi. Lokasi pemukiman informal sering kali tersembunyi dibelakang rumah atau ruko yang dibangun secara formal. Dalam kasus permukiman informal di sepanjang tepi sungai, situasi buruk permukiman seperti itu di bagian belakang rumah disamarkan oleh penampilan fasad depan yang bagus yang menghadap ke jalan. Fasad depan dan fasad belakang rumah di permukiman informal terutama permukiman yang dikembangkan di sepanjang tepi sungai sangat berbeda.



Gambar 2. Permukiman Kampung Kumuh di wilayah Kelurahan Tanjung Ria, kota Jayapura

Sumber: STD Bali, 2016

Infrastruktur Jalan

Biasanya pola sirkulasi di permukiman informal adalah linear mengikuti aliran sungai atau jalan. Jika permukiman dikembangkan di daerah yang curam, pola sirkulasi tegak lurus dengan sungai atau jalan. Jika sirkulasi utama dikembangkan di tengah area perumahan, fasad depan yang menghadap ke jalan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bagian belakang. Jika dikembangkan di sepanjang tepi sungai, penduduk akan membuang limbah yang mereka hasilkan setiap hari langsung ke sungai.

Sirkulasi sekunder lainnya di permukiman tidak memiliki pola khusus, karena mereka dikembangkan secara spontan mengikuti pola daerah perumahan. Ada banyak jalan kecil, jalan kecil atau lorong yang biasa disebut jalan tikus yang digunakan oleh penduduk sebagai alternatif sirkulasi ke jalan utama.



Gambar 3. Sirkulasi pada Kampung Kota di Tepi Sungai Musi - Palembang

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pengolahan Limbah Domestik

Banyak orang miskin di negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidak punya banyak pilihan selain tinggal di daerah kumuh dan di lingkungan yang tidak aman. Di tempat itu mereka memiliki ancaman ganda, yaitu masalah kesehatan dan keselamatan. Permukiman kumuh dan ilegal biasanya memiliki fasilitas infrastruktur dasar yang sangat sedikit. Masalah lingkungan akuatik dapat menjadi masalah serius jika dikaitkan dengan pertumbuhan populasi di Indonesia, yang juga berarti peningkatan volume air limbah domestik dari permukiman. Air limbah domestik harus ditangani dengan baik sehingga tidak menjadi ancaman bagi kualitas air karena dapat menyebabkan pencemaran air.

Upaya untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke badan air atau ke tempat lain adalah tindakan yang benar-benar perlu dipertimbangkan. Kondisi permukiman yang telah dibangun sangat padat seperti gambaran umum yang selalu didapat di lingkungan perkotaan, sehingga menyulitkan untuk membuat sistem pengolahan limbah rumah tangga. Masalah ini menyebabkan air limbah dibuang langsung ke badan air yang melewati permukiman. Pengembangan model pengolahan limbah domestik yang tepat dengan proses pengolahan yang efisien, sederhana dan murah tanpa meninggalkan aspek desain permukiman seperti estetika, kenyamanan dan kesehatan lingkungan dan dengan mempertimbangkan

keterbatasan lahan yang tersedia di daerah pemukiman desa perkotaan dan tingkat ekonomi Komunitas.

DASAR TEORI PENGEMBANGAN KAMPUNG KOTA

Berdasarkan Tujuan SDG 2030 ada banyak target yang harus dicapai oleh semua negara agar proses pembangunan di setiap negara dapat berkelanjutan. Aspek yang belum dicapai dalam MDG 2015, masih harus terus ditargetkan di SDG 2030. Tujuan utamanya adalah menghilangkan Kemiskinan Ekstrem dengan segala bentuknya pada tahun 2030. Masalah-masalah seperti kelaparan, kesehatan, kualitas pendidikan, migrasi gender, air bersih dan sanitasi, dll. masih tetap menjadi target dalam SDG 2030. *[The World Bank, 2018]* Masalah-masalah ini masih menjadi masalah utama bagi kota-kota di negara berkembang termasuk Indonesia. Karena sebagian besar masalah terjadi di Kampung Perkotaan, banyak orang, lembaga termasuk pemerintah daerah berpendapat bahwa Kampung Perkotaan adalah luka kota yang dapat merusak citra kota. *[Ribbeck, 2005]*

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan perhatian besar kepada orang miskin, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Karena umumnya kaum miskin kota tinggal di kampung kota, program perbaikan pemukiman Kampung sekarang menjadi salah satu program utama yang harus ditangani di Indonesia. Perhatian pemerintah ini dapat dilihat dari peraturan pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga peraturan daerah yang berlaku di seluruh Indonesia. Ini sangat jelas ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 34 dan amandemen UUD 1945 pasal 28A sampai 28J yang dibuat pada tahun 2000. *[MPR – RI, 2018]*

Berdasarkan pengamatan di beberapa kampung perkotaan di Indonesia, masalah kampung perkotaan mulai muncul ketika pemerintah daerah menganggap pemukiman kampung perkotaan sebagai citra buruk kota yang harus dihancurkan. Sebenarnya permukiman kampung perkotaan telah berkembang selama sekitar dua generasi atau lebih dari 15 tahun. Sosial budaya, kegiatan ekonomi, bahkan situasi psikologis kehidupan mereka telah berakar di daerah pemukiman mereka. *[Bekele, 2014]* Definisi pemukiman liar dan kumuh sangat bervariasi dari satu negara ke negara tergantung dari mana sudut pandang penyelesaian terlihat. Secara umum, pemahaman permukiman kumuh (slum) adalah permukiman yang lingkungannya berkualitas buruk dengan fasilitas infrastruktur yang sangat terbatas, tetapi tanah yang ditempati mempunyai sertifikasi secara hukum. Sementara pemahaman tentang pemukiman liar (squatter) adalah pemukiman di mana kualitas lingkungannya buruk, fasilitas infrastrukturnya sangat terbatas dan tanah yang ditempati adalah tanah tidak sah yang bukan milik penghuninya. Seperti di negara berkembang lainnya, hampir semua kota besar di Indonesia memiliki wilayah kampung perkotaan yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan kualitas lingkungan yang buruk dan fasilitas infrastruktur yang minim. *[Angel, 2005]*

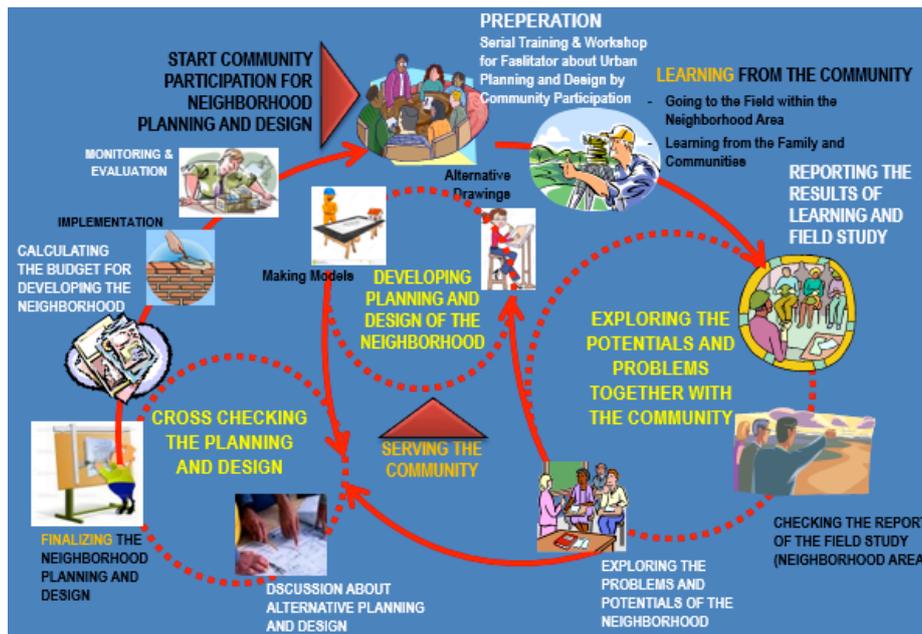
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PROGRAM KOTAKU

Seperti sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa implementasi program KOTAKU dilaksanakan di wilayah Kelurahan yang ada di dalam kota-kota di wilayah Kabupaten dan Kotamadya yang sudah dipilih berdasarkan 7 kriteria + 1. Inti dari program ini adalah melakukan pemberdayaan masyarakat (transfer of knowledge) yang dikemas dalam bentuk program pengurangan wilayah kumuh. Mulai dari persiapan, perencanaan, implementasi dan keberlanjutan dapat dijelaskan seperti pada Gambar 4.

Proses awal dilakukan dengan melakukan pelatim-pelatihan pada fasilitator yang akan mendampingi masyarakat membuat perencanaan permukiman yang

akan mengurangi wilayah kumuh. Setelah proses dilanjutkan dengan melakukan pemetaan swadaya sambil mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki masyarakat di wilayah yang dirancang. Kemudian hasil pemetaan swadaya dicross check dengan masyarakat.

Hasil dari pemetaan swadaya dimanfaatkan untuk membuat perencanaan kawasan permukiman di wilayah Kelurahan. Pada proses inilah *transfer of knowledge* mulai dilakukan secara intensif. Setelah pelaksanaan pembangunan infrastruktur selesai, tahap berikutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi hasil kerja yang sudah dilakukan. Selain itu pada tahap ini masyarakat diharapkan sudah mampu membuat perencanaan ke depan sesuai dengan mimpi yang mereka idam-idamkan. Dengan demikian program pemberdayaan yang dilakukan melalui program KOTAKU dapat dikembangkan secara berkelanjutan.



Gambar 4. Proses Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan Berbasis Komunitas

Sumber: Paparan Bawole pada International Conference Friendly City 2018 di Medan

HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di beberapa permukiman kampung perkotaan dilakukan bersamaan dengan membuat rencana pengembangan permukiman kampung kota. Proses pemberdayaan ini dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum - Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan nama Pembangunan Lingkungan [PLPBK] yang dilanjutkan dengan program KOTAKU. Program ini melibatkan semua komunitas yang bersedia bekerja untuk pengembangan permukiman mereka sendiri. Dalam program ini tidak ada bantuan pengembangan setelah menyelesaikan seluruh program. Jadi setelah implementasi selesai, maka masyarakat harus mandiri merawat dan mengembangkan kawasan perumahan tanpa bantuan apa pun.

Pencapaian utama yang harus diperoleh adalah pengorganisasian masyarakat yang dijelaskan dalam 3 hal besar, masing-masing: Dukungan Keuangan dan Pemasaran Sosial, Bantuan Teknis, dan Bantuan Hukum dan Manajemen. Dari tiga hal besar bantuan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara rinci melalui Pembangunan Infrastruktur, Renovasi Rumah, Lembaga Berkembang dan Pembaruan Perkotaan. Dalam empat kegiatan utama yang dilakukan bersama dengan masyarakat, fasilitator harus kreatif dalam menguraikan empat kegiatan

utama ke dalam program yang berlaku dan mampu mendorong orang yang tinggal di Kampung Kota. [Bawole, 2010]

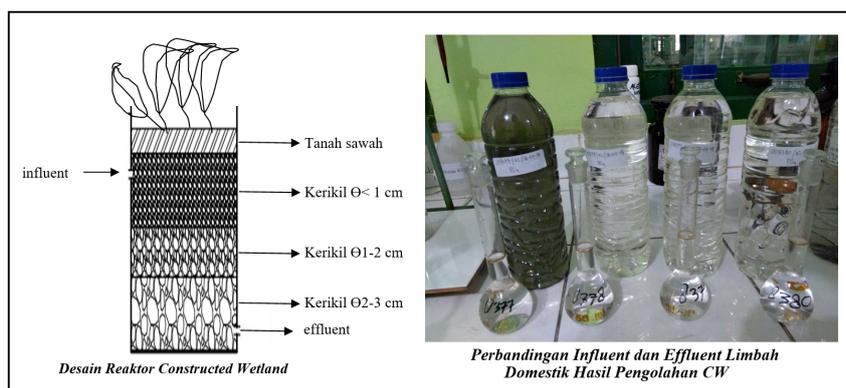
Ada beberapa contoh yang tersedia di beberapa Kelurahan di Kota Kediri, Indonesia. Selain itu, strategi pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah di sekitar pusat kota sudah dijelaskan dengan metodologi pendekatan Berbasis Masyarakat yang mengadvokasi pembangunan perumahan dari dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di daerah perkotaan. Pada prinsipnya, masyarakat berpenghasilan rendah akan dapat mengembangkan daerah perumahan mereka secara berkelanjutan, jika mereka diberi kesempatan dan juga didampingi pada seluruh proses perencanaan.



Gambar 5. Paparan Tim Kotaku Kelurahan Sanua – Kota Kendari dengan judul; Before - After

Sumber: Dokumentasi KMP Program Kotaku

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryati dari Fakultas Bioteknologi UKDW didapatkan bahwa pengolahan limbah domestik dengan Constructed Wetland Vertikal sangat membantu bagi permukiman kampung kota yang sudah terlanjur padat. Model lahan basah yang dibangun secara vertikal dapat dianggap sebagai sistem pengolahan limbah alternatif yang dapat diterapkan pada daerah dengan lahan terbatas seperti di desa-desa perkotaan. Sistem ini menunjukkan efisiensi penghilangan yang besar seperti penurunan total coliform yang dapat mencapai 99,67% dan penurunan kandungan polutan organik seperti yang ditunjukkan oleh penurunan nilai BOD dengan mencapai penurunan efisiensi 71,64. Sistem CW menggunakan tanaman hias, mampu memasok oksigen ke sistem yang dihasilkan dari fotosintesis yang didistribusikan ke akar, sehingga akan terbentuk zona rizosfer yang kaya akan mikroorganisme yang dapat memanfaatkan oksigen untuk melakukan kegiatan dekomposisi.



Gambar 5. Hasil Penelitian Haryati Berkaitan dengan Pengembangan Constructed Wetland.

Sumber: Proceedings Seminar Nasional Ritektra VII – Unika Atmajaya Makasar Tahun 2018

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagai hasil diskusi pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian terakhir ini akan diberikan beberapa kesimpulan. Pertama, dapat disimpulkan bahwa Metode Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan Berbasis Komunitas yang diprakarsai oleh beberapa pemangku kepentingan dapat memotivasi masyarakat untuk hidup di lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selain itu, proses kolaborasi pemegang saham berguna dalam memberdayakan masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan mereka perlahan dapat ditingkatkan.

Dari hasil survei ditemukan bahwa tidak semua masyarakat sebagai penerima manfaat program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota dengan program Kota Tanpa Kumuh mengalami perubahan karakter dalam kehidupan sehari-hari mereka terutama terkait dengan menjaga kualitas lingkungan di sekitar pemukiman mereka. Dengan berpartisipasi aktif dalam program Pemberdayaan Masyarakat Kampung, masyarakat lebih sadar akan risiko bencana yang mungkin terjadi setelah program pemberdayaan ini dilaksanakan.

Dari hasil wawancara terlihat meningkatnya pengetahuan masyarakat terutama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Kemandirian Masyarakat Kecamatan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan = LKMK tentang perencanaan dan implementasi perumahan kampung perkotaan pengembangan wilayah yang menjadi lokasi-lokasi yang diobservasi. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi program pengembangan masyarakat berpenghasilan rendah di kampung kota. Kegiatan program yang lebih baik harus dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah melibatkan masyarakat marjinal dalam seluruh proses pembangunan di wilayah Kampung Kota agar masyarakat dapat lebih mandiri untuk mengembangkan kualitas lingkungan di daerahnya. Penelitian yang telah dilakukan ini sangat bermanfaat untuk memberikan rasa hormat dan penghargaan yang lebih pada kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah di kampung kota yang menjadikan proses peningkatan kesejahteraan hidup setelah pembangunan fisik kampung kota dilaksanakan.

REFERENSI

- Angel, S.; etc. *The Dynamic of Global Urban Expansion*, Department of Transport and Urban Development, The World Bank, Washington, DC, 2005
- Bawole. Paulus: "A Collaboration of Spontaneous Architecture and Environmental Design Developed by Marginalized Inhabitants" in *Proceedings: Arte-Polis 3 International Conference: Creative Collaboration and the Making of Place: Learning*, Bandung, 2010The World Bank. (<http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview>)
- Bawole, Paulus, "Marginalized Architecture as An Identity of Urban Growth in Big Cities" in *Proceedings International Conference: Manifestations of Architecture in Indonesia*, Department of Architecture, ITS, Surabaya, 2015
- Bekele, Degu, etc., "Characteristics of Squatter Houses in Burayu Town Adjoining Addis Ababa, Capital City of Ethiopia" in *Journal Civil and Environment*, Vol. 6, No. 8, 2014
- MPR – RI. Amandemen UUD 1945 Tahun 2000
- Ribbeck, Eckhart. *Die Welt Wird Stadt*. Jovis Verlag GmbH, Berlin 2005
- Soltesova, Katarina, etc., "Community Participation in Urban Adaptation to Climate Change: Potential and Limits for Community-Based Adaptation Approaches" in *Community-Based Adaptation to Climate Change – Scaling it up*, edited by E. Lisa F. Schipper, etc., Oxon, 2014.
- Srinivas, Hari. "Defining Squatter Settlements." The Global Development Research Center. 19 Dec. 2016 (<http://www.gdrc.org/uem/define-squatter.html>)